

REKAPITULASI KERJASAMA YANG DIFASILITASI OLEH BIRO TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2019

Periode JANUARI- MEI 2019

NO	SURAT PERMOHONAN DAN MATERI KERJASAMA	PARA PIHAK	PROGRES FASILITASI	KETERANGAN
1.	PKS tentang Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder untuk Konservasi Ex-Situ Jenis Tanaman Langka	Pemda DIY (Gubernur DIY) dengan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan	Sudah ditandatangani Para Pihak Pada tgl 26 Desember 2018	
2.	PKS tentang Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder untuk Uji Coba Penanaman Cemara Udang (<i>Casuarina equisetifolia</i>)	Pemda DIY (Gubernur DIY) dengan UGM (Dekan Fakultas Kehutanan UGM)	Sudah ditandatangani Para Pihak Pada tgl 10 Desember 2018	
3.	PKS tentang Perubahan (Addendum) Atas Perjanjian Kerja sama Gubernur, Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta	Pemda DIY (Gubernur DIY), Pemda Bantul (Bupati Bantul), Pemda Sleman (Bupati Sleman) dan Pemkot (Walikota) Yogyakarta	Sudah ditandatangani Para Pihak Pada tgl 4 Januari 2019	
4.	PKS tentang Pengelolaan Batas Daerah Antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah	Pemda DIY (Sekda), Pemda Jateng (Sekda)	Sudah ditandatangani para pihak Pada tgl 7 Februari 2019	
5.	Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah DIY melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi	Pemda DIY (Gubernur) dan Kepala LAN	Sudah ditandatangani para pihak Pada tgl 24 Januari 2019	

	Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi.			
6.	Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta	Pemda DIY (Gubernur) dengan Menteri Ristekdikti	Sudah ditandatangani para pihak Pada tgl 2 Februari 2019	
7.	PKS tentang Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta	Pemda DIY (Sekda) dengan Sekjen Kemenristekdikti	Sudah ditandatangani para pihak Pada tgl 2 Februari 2019	
8.	Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah	Pemda DIY (Gubernur) dengan Pemda Bangkabelitung (Gubernur)	Sudah ditandatangani para pihak Pada tgl 22 Maret 2019	
9.	PKS tentang Kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Peningkatan, Pengembangan dan Pemberdayaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	UGM (Dekan Fakultas Pertanian, UGM) dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Sudah ditandatangani para pihak Pada tgl 23 Mei 2019	
10.	Draf Naskah Kesepakatan tentang Pelaksanaan Transmigrasi (Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 595/04471, tanggal 15 Mei 2019)	Pemda DIY dengan Provinsi Aceh; Pemda DIY dengan Provinsi Sulawesi Tenggara; Pemda DIY dengan Provinsi Sulawesi Barat..	Dalam antrian untuk dirapatkan dengan TTKSD	
11.	PKS tentang Pengembangan Wisata Alam pada sebagian Blok Pemanfaatan Resort II Kawasan Taman Hutan Raya Bunder (Surat Dinas LHK Nomor 525/11248, tanggal 12 April 2019)	Pemda DIY (Gubernur) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanawisata	Sudah dirapatkan dengan TTKSD pada tanggal Mei 2019, hasil akhir: - Substansi Draf PKS masih harus diperbaiki kembali oleh Dinas LHK	Mengacu pada Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerjasama dan Perizinan

				Pemanfaatan Taman Hutan Raya
12.	KSB dan PKS tentang (Surat Dinas Koperasi dan UKM Nomor 420/02833, tgl 9 Mei 2019)	Pemda DIY (Dinkop dan UKM) dengan STIE YKPN	Sudah dirapatkan dengan TKKSD pada tanggal Mei 2019, hasil akhir:	
13.	KSB & PKS tentang Kerjasama di bidang sains dan teknologi untuk kearsipan (Surat DPAD DIY Nomor 041/02441, tanggal 11 April 2019)	Universitas Sanata Darma dengan Pemda DIY (DPAD)	Sudah difasilitasi rapat dengan TKKSD pada tanggal Mei 2019, hasil akhir: <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama akan ditindaklanjuti awal dengan Membuat Kajian; - Mengkaji lebih lanjut barangkali akan dikembangkan kerjasama di bidang lain oleh fakultas lain. 	
14.	KSB tentang Pengembangan Pariwisata Halal (Surat Dinas Pariwisata Nomor 556/2666, tanggal 9 April 2019)	Kementerian Pariwisata dengan Pemda DIY (Dinas Pariwisata)	Sudah difasilitasi rapat dengan TKKSD pada tanggal Mei 2019, hasil akhir:	
15.	Addendum PKS tentang Ijin penangkapan ikan lintas provinsi DIY-Jawa Timur (Surat Dis Lautkan DIY)	Pemda DIY (Dis Lautkan DIY) dengan Pemda Jatim (Dis Lautkan Jatim)	Sudah difasilitasi rapat dengan TKKSD pada tanggal Mei 2019, hasil akhir:	
16.	KSB tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Surat BPJS Nomor B/7535/052019, tanggal 13 Mei 2019)	BPJS dengan Pemda DIY (Dinas Kesehatan)	Sudah difasilitasi rapat dengan TKKSD pada tanggal Mei 2019, hasil akhir:	

FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI YANG MASIH DALAM PROSES MAUPUN DAFTAR ANTRIAN DI BIRO TATA PEMERINTAHAN PERIODE
JANUARI S/D MEI 2019

1.	Draf Naskah Kesepakatan tentang Pelaksanaan Transmigrasi (Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 595/04471, tanggal 15 Mei 2019)	Pemda DIY dengan Provinsi Aceh; Pemda DIY dengan Provinsi Sulawesi Tenggara; Pemda DIY dengan Provinsi Sulawesi Barat..	Dalam antrian untuk dirapatkan dengan TKKSD	
2.	PKS tentang Pengembangan Wisata Alam pada sebagian Blok Pemanfaatan Resort II Kawasan Taman Hutan Raya Bunder (Surat Dinas LHK Nomor 525/11248, tanggal 12 April 2019)	Pemda DIY (Gubernur) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanawisata	Sudah dirapatkan dengan TKKSD pada tanggal 15 Mei 2019, hasil akhir: - Substansi Draf PKS masih harus diperbaiki kembali oleh Dinas LHK	Mengacu pada Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerjasama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya
3.	KSB tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di DIY dan PKS tentang peningkatan dan pengembangan sumber daya DIY melalui kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (Surat Universitas Aisyiyah, tgl 23 Januari 2019)	Pemda DIY dengan Universitas Aisyiyah	KSB maupun PKS sudah selesai pembahasan, sekarang masih Dalam proses penandatanganan	
4.	KSB tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan PKS tentang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian dan	Pemda DIY (Dinkop dan UKM) dengan STIE YKPN	Sudah dirapatkan dengan TKKSD pada tanggal 26 febuari 2019 (sebagai tindak lanjut dari permohonan di tahun 2018 yang masih diampu oleh BKPM), hasil	

	<p>pengembangan sumber daya manusia di DIY. (Surat Dinas Koperasi dan UKM Nomor 420/02833, tgl 9 Mei 2019)</p>		<p>akhir: substansi draf PKS harap segera dirumuskan oleh kedua belah pihak).</p> <p>Terkait dengan surat permohonan fasilitasi dari Dinkop , pelaksanaan fasilitasi masih menunggu antrian untuk dirapatkan dengan TTKSD.</p>	
5.	<p>KSB & PKS tentang Kerjasama di bidang sains dan teknologi untuk kearsipan (Surat DPAD DIY Nomor 041/02441, tanggal 11 April 2019)</p>	<p>Universitas Sanata Darma dengan Pemda DIY (DPAD)</p>	<p>Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 9 Mei 2019, hasil akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama akan ditindaklanjuti awal dengan Membuat Kajian; - Mengkaji lebih lanjut barangkali akan dikembangkan kerjasama di bidang lain oleh fakultas lain. 	
6.	<p>KSB tentang Pengembangan Pariwisata Halal (Surat Dinas Pariwisata Nomor 556/2666, tanggal 9 April 2019)</p>	<p>Kementerian Pariwisata dengan Pemda DIY (Dinas Pariwisata)</p>	<p>Dalam antrian untuk dirapatkan dengan TTKSD</p>	
7.	<p>Addendum PKS tentang Ijin penangkapan ikan lintas provinsi DIY- Jawa Timur (Surat Dis Lautkan DIY)</p>	<p>Pemda DIY (Dis Lautkan DIY) dengan Pemda Jatim (Dis Lautkan Jatim)</p>	<p>Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 11 Maret dan 20 Mei 2019, hasil akhir: Masih ada substansi yang harus dinegosiasikan dengan pihak Jawa Timur</p>	
8.	<p>KSB tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Surat BPJS Nomor B/7535/052019, tanggal 13 Mei 2019)</p>	<p>BPJS dengan Pemda DIY (Dinas Kesehatan)</p>	<p>Dalam antrian untuk dirapatkan dengan TTKSD</p>	
9.	<p>PKS tentang Pengembangan Smart City/Smart Regency untuk mewujudkan Jogja Smart Province</p>	<p>Diskominfo DIY dengan Diskominfo Se-DIY</p>	<p>Naskah PKS sudah selesai dan siap ditandatangani. Akan ditandatangani pada saat rakordal Juli.</p>	

	(surat Diskominfo 557/03819 tanggal 12 April 2019)			
10	PKS tentang penyelenggaraan pendidikan dalam pengembangan peserta didik asal provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Disdikpora DIY- Disdikpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 12 dan 20 Maret 2019, hasil akhir: substansi masih perlu banyak perbaikan di pihak Dikpora DIY.	
11	KSB tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan PKS tentang pembangunan dan pengoperasian jaringan peralatan dan system pemantauan kualitas udara ambien otomatis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 30 April, 3 Mei dan 29 Mei 2019. Hasil akhir : Kesepakatan bersama dibuat tiga pihak.	
12	KSB tentang pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan DIY.	Pemda DIY(Dikpora , Dinas Pariwisata, Dinas LHK) masing-masing dengan BPPT	Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 13 dan 21Februari serta 21 Maret 2019. Sudah dilakukan pembahasan di BPPT Pusat dengan hasil : substansi kerja sama dengan Dinas LHK dibatalkan, Pihak yang terkait dalam kepariwisataan diharapkan melibatkan Kabupaten Gunung Kidul. Untuk substansi kerjasama Dinas Pendidikan bisaa dilanjutkan	
13	Penawaran Kerja sama	Pemda DIY-Buka Lapak	Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 24 Januari 2019, hasil akhir: menunggu tindak lanjut dari OPD yang berminat untuk bekerja sama dengan buka lapak	
14	PKS tentang rencana induk pemanfaatan ruang di Berbah dan Gunung Kidul	Dinas PTR – UGM	Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 26 April 2019. Sekarang dalam proses penandatanganan.	
15	PKS tentang integrasi pelayanan rehabilitasi medis tersangka	Pemda DIY-BNN- Kejati-Polda-	Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 4 Febuari 2019 dan 18 April	

	penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba		2019. Hasil akhir; dengan adanya pergantian struktur organisasi di Pemda DIY terkait hak dan kewajiban RS Grhasia yang berada di bawah Dinas Kesehatan masih perlu disesuaikan untuk substansinya.	
16	KSB dan PKS tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di DIY.	Pemda DIY-BNN-Kejati-Polda-Balai POM	Sudah difasilitasi rapat dengan TTKSD pada tanggal 4 Februari 2019 dan 18 April 2019. Hasil akhir; dengan adanya pergantian struktur organisasi di Pemda DIY terkait hak dan kewajiban RS Grhasia yang berada di bawah Dinas Kesehatan masih perlu disesuaikan untuk substansinya.	